

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute, contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama.

(Sumber: Wikipedia. 2011. Kontribusi. Diakses dari <http://id.wikipedia.org.pada> tanggal 23 maret 2012, pukul 13.49 WIB).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Kamus Ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh bidang pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

(Sumber : dspace.widyatama.ac.id, diakses pada tanggal 23 maret 2012, pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kontribusi merupakan suatu keterlibatan yang diberikan oleh individu atau badan tertentu yang kemudian memposisikan perannya sehingga menimbulkan dampak tertentu yang dapat dinilai dari aspek sosial maupun aspek ekonomi.

B. Tinjauan Tentang Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Menurut Oka A. Yoeti (1996: 112), kata pariwisata sesungguhnya baru dipopulerkan di Indonesia setelah diselenggarakan Musyawarah Nasional Tourisme ke II di Trates, Jawa Timur pada tanggal 12 s/ d 14 Juni 1958. Sebelumnya, kata pariwisata digunakan kata “*tourisme*” (bahasa Belanda) yang sering di Indonesiakan menjadi “*turisme*”.

Secara Etimologis, kata pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang terbagi atas dua suku kata yaitu *Pari*, berarti banyak, berkali- kali, berputar- putar dan *Wisata*, berarti perjalanan, berpergian. Jadi pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan berkali- kali atau berputar- putar, dari suatu tempat ke tempat lain.

Pengertian pariwisata secara luas dapat dilihat dari pendapat para ahli, yaitu sebagai berikut :

- a. E. Guyer Freuler, Pariwisata dalam artian modern adalah merupakan fenomena dari zaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan akan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan rasa damai terhadap keindahan alam dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa

dan kelas masyarakat sebagai hasil dari perkembangan bisnis, industri, transportasi, dll

- b. Menurut Prof. Hunziker dan Prof. K. Krapf, pariwisata dapat didefinisikan sebagai keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal di situ untuk melakukan suatu pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara.
- c. Menurut A.J. Burkart dan S. Medlik, pariwisata berarti perpindahan orang untuk sementara atau dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja serta kegiatan-kegiatan mereka hanya sementara selama tinggal di tempat-tempat tujuan tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang ke suatu daerah dalam jangka waktu yang pendek yang ditujukan bukan untuk berusaha, mencari uang, tetapi untuk menikmati suasana baru yang tidak didapat dari daerah asalnya.

2. Jenis dan Macam Pariwisata

Menurut Oka A.Yoeti dalam bukunya Pengantar Ilmu Pariwisata (1996: 120) membagi jenis pariwisata dan macam pariwisata kedalam lima bagian. Yaitu :

1. Menurut letak geografis, dimana kegiatan pariwisata berkembang :
 - a. Pariwisata Lokal (*Local Tourism*), adalah pariwisata setempat yang mempunyai ruang lingkup relatif sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja.
 - b. Pariwisata Regional (*Regional Tourism*), adalah kegiatan kepariwisataan yang berkembang disuatu tempat atau daerah yang ruang lingkungannya lebih luas bila dibandingkan dengan *local tourism*, tetapi lebih sempit bila dibandingkan dengan kepariwisataan nasional (*national tourism*).
 - c. Kepariwisataan Nasional (*National Tourism*)
 - Kepariwisataan nasional dalam arti sempit, yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang dalam wilayah suatu negara.

- Kepariwisataan nasional dalam arti luas, yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang dalam wilayah suatu negara.
 - d. *Regional- International Tourism*, yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang disuatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas- batas lebih dari dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut.
 - e. *International Tourism*, yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang diseluruh negara didunia.
2. Menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran :
 - a. Pariwisata aktif, adalah kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala masuknya wisatawan asing kesuatu negara tertentu.
 - b. Pariwisata pasif, adalah kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala keluarnya warga negara sendiri berpergian ke luar negeri sebagai wisatawan.
 3. Menurut alasan/ tujuan perjalanan :
 - a. *Business Tourism*, adalah jenis pariwisata dimana pengunjungnya datang untuk tujuan dina, usaha dagang atau yang berhubungan dengan pekerjaannya, kongres, seminar, simposium, musyawarah kerja.
 - b. *Vocational Tourism*, adalah jenis pariwisata dimana orang- orang yang melakukan perjalanan wisata terdiri dari orang- orang yang sedang berlibur, cuti atau pakansi.
 - c. *Educational Tourism*, adalah jenis pariwisata dimana pengunjung atau orang melakukan perjalanan untuk tujuan studi atau mempelajari sesuatu bidang ilmu pengetahuan.
 4. Menurut saat atau waktu berkunjung :
 - a. *Seasional Tourism*, adalah jenis pariwisata yang kegiatannya berlangsung pada musim- musim tertentu.
 - b. *Occasional Tourism*, adalah jenis pariwisata dimana perjalanan wisatanya dihubungkan dengan kejadian maupun suatu *events*.
 5. Pembagian menurut obyeknya :
 - a. *Cultural Tourism*, adalah jenis pariwisata dimana motivasi orang- orang untuk melakukan perjalanan disebabkan karena adanya daya tarik dari seni budaya suatu tempat atau daerah.
 - b. *Recuperational Tourism*, adalah suatu pariwisata kesehatan yang bertujuan untuk menyembuhkan sesuatu penyakit, misalnya: pariwisata pemandian air panas.
 - c. *Commercial Tourism*, adalah pariwisata perdagangan, karena perjalanan wisata ini dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional atau internasional.
 - d. *Sport Tourism*, adalah jenis pariwisata olahraga yang bertujuan untuk menyaksikan suatu pesta olahraga disuatu tempat atau negara tertentu.

- e. *Political Tourism*, adalah jenis pariwisata politik yang bertujuan untuk melihat atau menyaksikan suatu peristiwa yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara.
- f. *Social Tourism*, adalah jenis pariwisata yang berkaitan dengan remaja, dimana pengertian ini hanya dilihat dari segi penyelenggaraannya saja yang tidak menekankan untuk mencari keuntungan.
- g. *Religion Tourism*, adalah jenis pariwisata agama yang dilakukan untuk menyaksikan upacara- upacara keagamaan.

Prof. Wahab, dalam bukunya *Tourism Management* (Oka A. Yoeti 1996), membagi bentuk pariwisata sesuai dengan motivasi perjalanan yang dilakukan serta objek yang dikunjungi, yakni sebagai berikut :

- a. Menurut jumlah orang yang melakukan perjalanan, dapat dibedakan dengan dua bagian penting, yaitu :
 - 1. *Individual Tourism*
 - 2. *Group Tourism*
- b. Menurut maksud dari perjalanan yang dilakukan, yang dapat dibagi sebagai berikut :
 - 1. *Recreational Tourism*
 - 2. *Cultural Tourism*
 - 3. *Health Tourism*
 - 4. *Sport Tourism*
 - 5. *Conference Tourism*
- c. Menurut alat pengangkutan yang digunakan :
 - 1. *Land Tourism*
 - 2. *Sea River Tourism*
 - 3. *Air Tourism*
- d. Menurut letak geografisnya :
 - 1. *National Domestic Tourism*
 - 2. *Regional Tourism*
 - 3. *International Tourism*
- e. Menurut umur yang melakukan perjalanan :
 - 1. *Youth Tourism*
 - 2. *Abdulr Tourim*
- f. Menurut jenis kelamin :
 - 1. *Masculine Tourism*
 - 2. *Feminine Tourism*
- g. Menurut harga dan tingkat sosial :
 - 1. *Deluxe Tourism*
 - 2. *Middle Class Tourism*
 - 3. *Social Tourism*

3. Komponen-Komponen Pariwisata

Menurut Inskeep dalam Buku Pengantar Ilmu Pariwisata (Oka A. Yoeti 1996) , ada beberapa komponen wisata yang selalu ada dan merupakan komponen dasar dari wisata. Komponen-komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain.

Komponen-komponen wisata tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Atraksi dan kegiatan-kegiatan wisata
Kegiatan-kegiatan wisata dapat berupa semua hal yang berhubungan dengan lingkungan alami, kebudayaan, keunikan suatu daerah dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan wisata yang menarik wisatawan untuk mengunjungi sebuah objek wisata.
- b. Akomodasi
Akomodasi yang dimaksud adalah berbagai macam hotel dan berbagai jenis fasilitas lain yang berhubungan dengan pelayanan untuk para wisatawan yang berniat untuk bermalam selama perjalanan wisata yang mereka lakukan.
- c. Fasilitas dan pelayanan wisata
Fasilitas dan pelayanan wisata yang dimaksud adalah semua fasilitas yang dibutuhkan dalam perencanaan kawasan wisata. Fasilitas tersebut termasuk *tour and travel operations* (disebut juga pelayanan penyambutan). Fasilitas tersebut misalnya : restoran dan berbagai jenis tempat makan lainnya, toko-toko untuk menjual hasil kerajinan tangan, cinderamata, toko-toko khusus, toko kelontong, bank, tempat penukaran uang dan fasilitas pelayanan keuangan lainnya, kantor informasi wisata, pelayanan pribadi (seperti salon kecantikan), fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas keamanan umum (termasuk kantor polisi dan pemadam kebakaran), dan fasilitas perjalanan untuk masuk dan keluar (seperti kantor imigrasi dan bea cukai).
- d. Fasilitas dan pelayanan transportasi
Meliputi transportasi akses dari dan menuju kawasan wisata, transportasi internal yang menghubungkan atraksi utama kawasan wisata dan kawasan pembangunan, termasuk semua jenis fasilitas dan pelayanan yang berhubungan dengan transportasi darat, air, dan udara.

- e. **Infrastruktur lain**
Infrastruktur yang dimaksud adalah penyediaan air bersih, listrik, *drainase*, saluran air kotor, telekomunikasi (seperti telepon, telegram, telex, faksimili, dan radio).
- f. **Elemen kelembagaan**
Kelembagaan yang dimaksud adalah kelembagaan yang diperlukan untuk membangun dan mengelola kegiatan wisata, termasuk perencanaan tenaga kerja dan program pendidikan dan pelatihan; menyusun strategi marketing dan program promosi; menstrukturisasi organisasi wisata sektor umum dan swasta; peraturan dan perundangan yang berhubungan dengan wisata; menentukan kebijakan penanaman modal bagi sektor publik dan swasta; mengendalikan program ekonomi, lingkungan, dan sosial kebudayaan.

4. **Konsep Pengertian Industri Pariwisata**

Menurut Oka A. Yoeti (1996: 145) ada beberapa konsep mengenai industri pariwisata, yaitu sebagai berikut :

- a. **Pemakaian istilah Industri Pariwisata.** Dalam literatur kepariwisataan luar negeri kata industri pariwisata disebut dengan istilah *tourist industry* atau ada yang menyebutnya dengan *travel industry* yang berarti perjalanan wisata.

Produk pariwisata adalah keseluruhan pelayanan yang diterima oleh wisatawan, semenjak ia meninggalkan tempat kediaman dimana ia biasa tinggal, sampai ditempat tujuan (daerah tujuan wisata) dan kembali kerumah dimana ia berangkat semula.

- b. **Pengertian pariwisata sebagai suatu industri**
Menurut G. Janata, pariwisata dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu *dynamic sector* dan *state sector*. Yang dimaksud dengan *dynamic sector* yaitu kegiatan yang berhubungan dengan *travel agent operator*, angkutan wisata dan pelayanan lain yang berkaitan. Sedangkan yang dimaksud dengan *state sector* yaitu perusahaan akomodasi perhotelan, *catering service*, transportasi, dsb.

Menurut A.G.B. Fisher, industri pada umumnya dapat diklasifikasikan atas tiga golongan yaitu :

1. *Primari Industry*, yang termasuk kedalam kelompok ini adalah pertanian, pertambangan, peternakan, dan industri lainnya.
2. *Secondary Industry*, yang termasuk kedalam kelompok ini adalah *manufacturing, countructions* (seperti pembuatan jembatan, gedung- gedung dan perumahan)

3. *Tertiary Industry*, yang termasuk dalam kelompok ini adalah perdagangan, transportasi, akomodasi, komunitas dan fasilitas.
- c. Pengertian dan Definisi Industri Pariwisata
Industri Pariwisata adalah kumpulan dari macam- macam perusahaan yang secara bersama menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan wisatawan pada khususnya dan *traveller* pada umumnya selama dalam perjalanannya.

Menurut R.S. Damarjadi (Oka A. Yoeti 1996), yang dimaksud dengan industri pariwisata adalah merupakan rangkuman dari berbagai macam bidang usaha, yang secara bersama- sama menghasilkan produk- produk maupun jasa- jasa yang nantinya baik secara langsung maupun tidak langsung akan dibutuhkan oleh wisatawan selama perawatannya.

5. Konsep Pengertian Produk Industri Pariwisata

Produk industri pariwisata merupakan suatu susunan produk yang terpadu, yang terdiri dari objek wisata, atraksi wisata, transportasi, akomodasi dan hiburan, dimana tiap unsur dipersiapkan oleh masing- masing perusahaan dan ditawarkan secara terpisah.

Ciri- ciri produk industri pariwisata yaitu :

- a. Hasil atau produk industri pariwisata itu tidak dapat dipindahkan.
- b. Pada umumnya peranan perantara tidak diperlukan, karena proses produksi terjadi pada saat bersamaan dengan konsumsi.
- c. Hasil atau produk industri pariwisata tidak dapat ditimbun, seperti halnya terjadi pada industri barang lainnya, dimana penimbunan hanya merupakan kebiasaan untuk meningkatkan permintaan.

- d. Hasil atau produk industri pariwisata itu tidak mempunyai standar atau ukuran yang objektif.
- e. Permintaan (*demand*) terhadap hasil atau produk industri pariwisata tidak tepat dan sangat dipengaruhi oleh faktor- faktor non ekonomis.
- f. Calon konsumen tidak dapat mencoba atau mencicipi produk yang akan dibelinya.
- g. Hasil atau produk industri pariwisata itu banyak tergantung pada tenaga manusia dan sedikit sekali yang dapat digantikan dengan mesin.
- h. Dari segi pemilikan usaha, penyediaan produk industri pariwisata dengan membangun sarana kepariwisataan yang memakan biaya besar, mempunyai tingkat resiko yang tinggi, karena perubahan elastisitas permintaan.

6. Penawaran Pariwisata

Menurut Salah Wahab dalam bukunya Manajemen Kepariwisata (1992: 109), penawaran pariwisata ditandai oleh 3 ciri khas utama yaitu :

1. Penawaran jasa- jasa
2. Penawaran bersifat rigid (kaku)
3. Penawaran pariwisata belum menjadi kebutuhan pokok manusia

Adapun unsur- unsur penawaran dalam pariwisata adalah :

Sumber- sumber alam :

1. Iklim
2. Tata letak tanah dan pemandangan alam
3. Unsur rimba
4. Flora dan fauna
5. Pusat- pusat kesehatan

Hasil karya buatan manusia:

1. Yang berciri sejarah, budaya dan agama:
 - a. Monumen- monumen dan peninggalan- peninggalan bersejarah dari peradaban masa lalu
 - b. Tempat- tempat budaya seperti musium, gedung kesenian, tugu peringatan, dll.
 - c. Perayaan- perayaan tradisional
 - d. Bangunan- bangunan raksasa dan biara- biara keagamaan
2. Prasarana- prasarana
 - a. Prasarana umum
 - b. Kebutuhan pokok pola hidup modern
 - c. Prasarana wisata
3. Sarana pencapaian dan alat transportasi penunjang, meliputi pelabuhan udara, kapal- kapal, dll.
4. Sarana pelengkap, misalnya bioskop, kedai- kedai, warung- warung kopi.
5. Pola hidup masyarakat yang sudah menjadi salah satu khasanah wisata yang sangat penting.

7. Manfaat Pariwisata

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai manfaat terhadap masyarakat setempat dan sekitarnya. Bahkan pariwisata dikatakan mempunyai energi dobrak yang luar biasa, yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami perubahan dalam berbagai aspeknya.

Kusno Abi (1998 : 124) mengemukakan bahwa Pariwisata mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat bahkan bagi negara sekalipun, manfaat pariwisata dapat dilihat dari berbagai aspek/segmen yaitu manfaat pariwisata dari segi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, nilai pergaulan dan ilmu pengetahuan, peluang dan kesempatan kerja.

Menurut Kusno Abi (1998 : 125) ada beberapa manfaat pariwisata yakni:

- a. Manfaat pariwisata dari segi ekonomi
Manfaat pariwisata dari segi ekonomi adalah pariwisata menghasilkan devisa yang besar bagi daerah sehingga meningkatkan perekonomian daerah. Kontribusi pariwisata menunjukkan trend yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini bisa dilihat dari peningkatan target dan realisasi dari pendapatan retribusi obyek wisata. Selain menghasilkan devisa pariwisata juga memberikan dampak ekonomi secara langsung bagi masyarakat sekitar.
- b. Manfaat pariwisata dari segi budaya
Manfaat lain yang muncul dari industri pariwisata ini antara lain dapat terlihat pula dari segi budaya. Dengan pesatnya perkembangan industri pariwisata maka akan membawa pemahaman dan pengertian antar budaya melalui interaksi pengunjung wisata dengan masyarakat lokal tempat daerah wisata tersebut berada. Dari interaksi inilah para wisatawan dapat mengenal dan menghargai budaya masyarakat setempat dan juga memahami latar belakang kebudayaan lokal yang dianut oleh masyarakat tersebut.
- c. Manfaat pariwisata dari segi lingkungan hidup
Pariwisata juga mendatangkan manfaat bagi lingkungan hidup karena sebuah objek wisata apabila ingin banyak mendapatkan kunjungan dari wisatawan haruslah terjaga kebersihannya sehingga kita menjadi terbiasa untuk merawat dan menjaga lingkungan kita agar selalu terjaga kebersihannya. Pembangunan pariwisata tidak mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan dan penurunan kualitas tanah atau lahan pertanian baik lahan perladangan maupun persawahan. Kelestarian hutannya masih tetap terjaga dengan baik. Masyarakat secara bersama-sama dan sepakat untuk melestarikan hutannya dan tanpa harus ketergantungan terhadap hutan tersebut. Pada dasarnya masyarakat lokal telah sadar terhadap perlunya pelestarian hutan, karena kawasan hutan yang dimaksud merupakan daerah resapan air yang bisa dipergunakan untuk kepentingan hidupnya maupun makhluk hidup yang lainnya serta untuk keperluan persawahan.
- d. Manfaat pariwisata dari segi nilai pergaulan dan ilmu pengetahuan
Manfaat pariwisata yang kita dapat dari segi nilai pergaulan adalah kita menjadi lebih banyak mempunyai teman dari berbagai daerah bahkan negara lain dan kita bisa mengetahui kebiasaan orang yang dari masing-masing daerah tersebut sehingga kita bisa mempelajari bagaimana kebiasaan yang baik di masing-masing daerah. Selain itu kita juga mendapat manfaat ilmu pengetahuan dari pariwisata karena dengan mempelajari pariwisata kita juga bisa tahu dimana letak dan keunggulan sebuah objek wisata sehingga bisa mempelajari mengapa sebuah objek wisata tersebut bisa maju dan bisa

menerapkan di objek wisata daerah kita yang belum berkembang dengan baik.

- e. Manfaat pariwisata dari segi peluang dan kesempatan kerja
Pariwisata juga menciptakan kesempatan kerja. Sarana-sarana pariwisata seperti hotel dan perjalanan adalah usaha yang "padat karya". Menurut perbandingan jauh lebih banyak untuk hotel dan restoran daripada untuk usaha-usaha lainnya. Untuk setiap tempat tidur dibutuhkan kira-kira 2 orang tenaga. Pariwisata juga menciptakan peluang kerja yang tidak berhubungan langsung dengan pariwisata, seperti di bidang konstruksi bangunan dan jalan. Banyak bangunan yang didirikan untuk hotel, restoran, toko artshop, dll. Wisatawan juga memerlukan makan dan minum, ini semua secara tidak langsung menciptakan lapangan kerja di bidang pertanian. Jadi, pariwisata mempunyai banyak manfaat dari segi peluang dan kesempatan kerja.

C. Tinjauan Tentang Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Ahmad Yani (2009: 51), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang- Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan azas desentralisasi.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber- sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pendapatan daerah juga merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah. Pendapatan asli daerah juga dapat diartikan bahwa merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber- sumber atau potensi yang ada pada daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah didalam memperoleh pendapatan daerah.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum pendapatan asli daerah menurut Ahmad Yani (2009: 51) yaitu :

- a. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

c. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Ahmad Yani (2009: 52) yaitu :

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

a. Jenis- jenis Pajak Daerah

Jenis pajak Provinsi terdiri dari sebagai berikut :

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Jenis pajak Kabupaten/ Kota terdiri dari sebagai berikut :

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
7. Pajak parki

b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

1. Subjek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/ atau menguasai kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
2. Subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
3. Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kendaraan bermotor.
4. Subjek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah atau air permukaan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah/ air permukaan.
5. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel.
6. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib pajaknya adalah pengusaha restoran.

7. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton/ atau menikmati hiburan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
8. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
9. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pengguna/ pelanggan tenaga listrik.
10. Subjek pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C.
11. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

c. Objek Pajak Daerah

1. Objek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air adalah kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
2. Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air adalah penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
3. Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.
4. Objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pengambilan air bawah tanah dan/ atau air permukaan, pemanfaatan air bawah tanah dan/ atau air permukaan, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/ atau air permukaan.
5. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk :
 - Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
 - Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek dan sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
 - Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel.
6. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.

7. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
8. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame
9. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, diwilayah daerah yang tersedia penerangan jalan dan rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
10. Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.
11. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan.

d. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Daerah

- a. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok yaitu :
 - 1) Nilai jual kendaraan bermotor
 - 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat pengguna kendaraan bermotor.
- b. Dasar pengguna bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air adalah nilai jual kendaraan bermotor.

e. Perhitungan Besarnya Pajak Daerah Terutang

Besarnya Pokok Pajak Daerah yang terutang untuk masing-masing jenis pajak daerah dihitung dengan cara mengkalikan tarif dengan dasar pengenaan pajaknya.

f. Bagi Hasil Pajak Daerah

- a. Bagi hasil pajak Provinsi kepada daerah Kabupaten/ kota
 - 1) Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, dan bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air diserahkan kepada daerah kabupaten/ kota di provinsi yang bersangkutan paling sedikit 30%.
 - 2) Hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan diserahkan kepada daerah kabupaten/ kota di provinsi yang bersangkutan paling sedikit 70%.
 - 3) Penggunaan bagian daerah kabupaten/ kota ditetapkan sepenuhnya oleh daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan.
- b. Bagi hasil pajak Kabupaten kepada Desa
 - 1) Hasil penerimaan pajak kabupaten diperuntukkan paling sedikit 10% bagi desa diwilayah kabupaten yang bersangkutan.

- 2) Bagian desa ini ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan memerhatikan aspek pemerataan dan potensi antar desa.
- 3) Penggunaan bagian desa ditetapkan sepenuhnya oleh desa yang bersangkutan.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

a. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi Daerah

- 1) Subjek retribusi umum
- 2) Subjek retribusi jasa usaha
- 3) Subjek retribusi perizinan tertentu

b. Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis- jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tersebut dikelompokkan kedalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis- jenis retribusi umum adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk (KTP) dan akta catatan sipil.
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- f. Retribusi pelayanan pasar
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadaman kebakaran
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta
- j. Retribusi pengujian kapal perikanan

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

Jenis- jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan
- c. Retribusi tempat pelelangan
- d. Retribusi terminal
- e. Retribusi tempat khusus parkir
- f. Retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa
- g. Retribusi penyedotan kakus
- h. Retribusi rumah potong hewan
- i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- j. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- k. Retribusi penyeberangan diatas air
- l. Retribusi pengolahan limbah cair
- m. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Objeknya adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberi izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis- jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek

c. Besarnya Retribusi yang Terutang dan Tarif Retribusi Daerah

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengkalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memerhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

d. Bagi Hasil Retribusi Kabupaten kepada Desa

Hasil penerimaan jenis retribusi tertentu sebagian diperuntukkan kepada desa yang terlibat langsung dalam pemberian pelayanan, seperti retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan alam yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain- lain PAD yang Sah

Lain- lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis- jenis lain- lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah.
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum

- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
Pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan

D. Tinjauan Tentang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Lampung Barat

a. Profil Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam mengantisipasi dan menyikapi perubahan paradigma pembangunan melalui semangat otonomi daerah, maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Lampung Barat harus mempunyai arahan yang jelas, terarah dan berkesinambungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah, dengan tetap mengacu pada Pola Dasar Pembangunan dan Rencana Strategis Kabupaten Lampung Barat.

Berkaitan dengan hal di atas, Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai arahan kinerja untuk kurun waktu lima tahun yakni tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 sebagaimana masa Renstra Kabupaten Lampung Barat.

(Sumber: Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat, 29 Maret 2012)

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Lampung Barat

a. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

b. Fungsi

untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
5. Pelayanan Administratif

(Sumber: PPKAD Kabupaten Lampung Barat, 29 Maret 2012)

c. Visi, Misi dan Tujuan Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat

a. Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke arah mana Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat harus di bawa, agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi juga dapat digambarkan sebagai suatu keadaan yang menantang tentang masa depan yang diinginkan oleh Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat, dengan mempertimbangkan inisiasi-inisiasi, idealisme, informasi, identifikasi, insepasi dan forecasting, yakni pemikiran tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang serta memperhatikan keinginan *Stake Holders*, maka visi Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat adalah “ Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional”

b. Misi

Misi merupakan pokok-pokok kegiatan yang harus dilaksanakan oleh SKPD dalam rangka mencapai suatu visi, yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan tujuan, sasaran dan strategi, dengan kata lain misi merupakan tujuan utama ke arah mana perencanaan SKPD ingin dicapai.

Adapun Misi Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah

c. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi serta merupakan keadaan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat. Tujuan Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang optimal.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah yang optimal

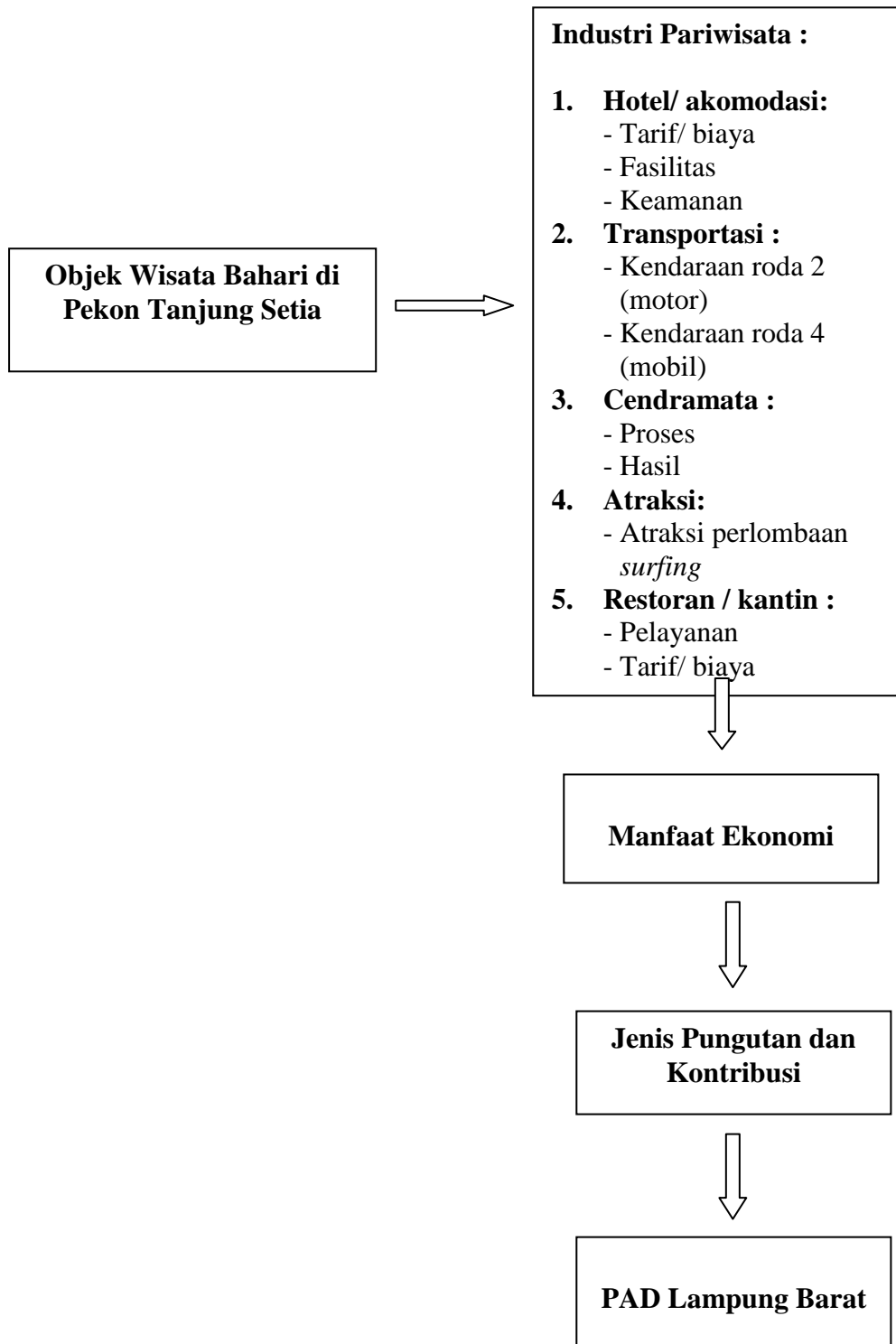
E. Kerangka Pikir

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan pemerintah dalam ke pemerintahannya dapat diukur dengan tingkat pendapatan daerah yang dikelola. Pembangunan merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, karena dengan adanya pembangunan yang merata di setiap daerah maka pendapatan daerah akan meningkat, seperti misalnya pembangunan pariwisata di daerah yang berpotensi.

Pariwisata merupakan potensi besar bagi pemerintah dan masyarakat apabila dikelola serta diberdayakan dengan baik, untuk itu perlu adanya perencanaan yang matang bagi pemerintah dalam pengembangan industri pariwisata. Adanya pembangunan pariwisata di daerah yang berpotensi maka akan meningkatkan PAD. Berdasarkan hal ini yang dimaksud dengan peningkatan PAD yaitu dengan adanya pembangunan serta pengembangan objek wisata

Bahari di Pekon Tanjung Setia diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi yang diberikan oleh objek wisata Bahari yang berlokasi di Pekon Tanjung Setia dapat diukur melalui pajak hotel/ *cottage* dan pajak restoran.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kontribusi yang sebenarnya dari sektor pariwisata objek wisata Bahari di Pekon Tanjung Setia untuk PAD Kabupaten Lampung Barat. Agar lebih mudah dalam memahami penelitian ini, berikut adalah bagan kerangka pikir penelitian:



Gambar 1. Kerangka Pikir